
EVALUASI KEBIJAKAN PROGRAM KELOMPOK USAHA BERSAMA (KUBE) AMAR PATRIA UNIT 06 DI DESA KERTA JAYA, KECAMATAN PADALARANG, KABUPATEN BANDUNG BARAT

Muhammad Ridwan Silehul

1Program Studi Magister Administrasi dan Kebijakan Publik, Fakultas Pascasarjana, Universitas Pasundan, Bandung

Email: silehuridwan@gmail.com

Abstrak

Tujuan dari pelaksanaan program KUBE adalah untuk meningkatkan perekonomian masyarakat, melalui program pemberdayaan masyarakat, program tersebut tidak hanya difokuskan pada peningkatan perekonomian saja, tetapi lebih pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah daerah Kabupaten Bandung Barat melalui Dinas Sosial merencanakan dan melaksanakan program tersebut. Untuk mengukur keberhasilan program tersebut maka perlu dilakukan evaluasi. Evaluasi kebijakan merupakan kegiatan untuk menilai atau melihat keberhasilan atau kegagalan suatu program/kebijakan yang dijalankan oleh individu/organisasi. Metode penelitian yang digunakan adalah analisis deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Metode penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti kondisi objek yang alamiah, (berlawanan dengan eksperimen) dimana peneliti merupakan instrumen kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara sistematis. Purposive dan Snowball, Teknik pengumpulan dengan tri - angulasi (gabungan), analisis dan sifat induktif atau kualitatif dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan pada makna daripada generalisasi. Teknik pengumpulan data dengan cara melakukan observasi dan wawancara secara langsung kepada narasumber yang dijadikan objek dan lokus penelitian yaitu Dinas Sosial Kabupaten Bandung Barat dan Kelompok Usaha Bersama (Kube) Amar Patria Unit 06 di Desa Kerta Jaya, Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, serta dokumentasi. dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi kemudian disusun dalam bentuk narasi dan selanjutnya dilakukan analisis terhadap bahan-bahan yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi. Pelaksanaan Program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) belum dapat dikatakan optimal, masih terdapat faktor-faktor yang menghambat dalam pelaksanaan kebijakan tersebut, diantaranya, Sosialisasi belum dilaksanakan secara serentak dan hanya dilaksanakan di awal saja tanpa menindaklanjuti apakah sosialisasi tersebut dapat dimengerti dan dipahami oleh kelompok dan anggota KUBE. Dan Pendampingan dalam pemasaran hasil produksi belum berjalan, serta sarana prasarana pendukung program masih dirasakan minim, banyak dari anggota kelompok yang kesulitan dalam melaksanakan program.

Kata kunci:*Evaluasi Kebijakan, Program Kelompok Usaha Bersama (Kube), Amar Patria, Kabupaten Bandung Barat*

A. PERKENALAN

Kemiskinan merupakan masalah kompleks dan multidimensi yang dihadapi hampir setiap negara di dunia. Jumlah penduduk miskin tidak pernah berkurang; bahkan, kemiskinan telah menjadi semacam teror yang mencengkeram dunia. Di Indonesia, kemiskinan masih menjadi isu fundamental yang dihadapi pemerintah. Situasi kemiskinan suatu negara sangatlah kompleks, dengan kuantitas dan kualitas yang mencerminkan kemajuannya.

Menurut Undang-Undang No. 24 Tahun 2004 tentang Kemiskinan, kemiskinan adalah kondisi sosial ekonomi seseorang atau sekelompok orang yang tidak terpenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupannya, meliputi sandang, pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, sumber daya alam, lingkungan hidup, rasa aman dari perlakuan atau ancaman kekerasan, dan hak untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan kehidupan sosial dan politik.

Menurut Suryawati (2005), terdapat dua penyebab kemiskinan: kemiskinan kultural dan kemiskinan struktural. Kemiskinan kultural disebabkan oleh faktor-faktor budaya, seperti keengganan untuk berusaha meningkatkan taraf hidup, seperti kemalasan dan gaya hidup yang dapat membuat

seseorang miskin, artinya kemiskinan merupakan akibat dari kebiasaan atau sifat yang dimiliki individu. Kemiskinan struktural, di sisi lain, adalah rendahnya akses terhadap sumber daya yang terjadi dalam suatu sistem sosial-budaya. Kemiskinan struktural dapat disebabkan oleh kondisi ekonomi yang dapat mengubah keadaan.

Kementerian Sosial RI, sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas penanggulangan kemiskinan, telah menetapkan kebijakan dan program pemberdayaan. Salah satu inisiatif pemberdayaan ini dilaksanakan melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE). Penanggulangan kemiskinan bukan hanya tanggung jawab Kementerian Sosial; hal ini membutuhkan kolaborasi lintas sektor. Sebagai pemangku kepentingan, dalam hal penanggulangan kemiskinan, Kementerian Sosial merupakan leading sector dalam pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan. Beberapa program Kementerian Sosial yang berkaitan dengan penanggulangan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat termasuk Kelompok Usaha Bersama (KUBE).

Kelompok Usaha Bersama bertujuan untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan dengan meningkatkan kemampuan usaha anggota KUBE secara kolektif, meningkatkan pendapatan, mengembangkan usaha, serta menumbuhkan kesadaran sosial dan solidaritas antar anggota KUBE dan masyarakat sekitar. Pembentukan KUBE mendorong anggota KUBE untuk mengembangkan dan meningkatkan kemampuan ekonomi mereka secara berkelompok.

Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial No. 2 Tahun 2019 tentang Bantuan Sosial Usaha Ekonomi Produktif kepada Kelompok Usaha Bersama (KUBE) untuk penanganan masyarakat miskin, disebutkan bahwa salah satu program unggulan Kementerian Sosial Republik Indonesia adalah dalam rangka penanggulangan kemiskinan di Indonesia. Rencana yang diluncurkan menekankan peningkatan dan pengelolaan pendapatan melalui Usaha Ekonomi Produktif (UEP). Indikator keberhasilan program KUBE adalah kemandirian keluarga miskin penerima bantuan UEP. Untuk penanggulangan kemiskinan, KUBE telah mengadopsi strategi berikut: penguatan kelompok dan menggunakan pendekatan pekerjaan sosial untuk memberikan bantuan dan bimbingan stimulus usaha.

Kabupaten Bandung Barat merupakan kabupaten baru di Provinsi Jawa Barat, hasil pemekaran dari Kabupaten Bandung. Kabupaten Bandung Barat baru berusia 18 tahun setelah pemekaran pada tahun 2007. Sebagai daerah yang masih berkembang, pembangunan di Kabupaten Bandung Barat tentu saja berlangsung intensif. Selain infrastruktur dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), pertumbuhan ekonomi masih menjadi isu utama, termasuk kemiskinan di Kabupaten Bandung Barat.

Berdasarkan data BPS tahun 2022, jumlah penduduk Kabupaten Bandung Barat sebanyak 1.814.226 jiwa, sedangkan jumlah penduduk miskin dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2022 mengalami peningkatan, sebagaimana terlihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 1.1.
Garis Kemiskinan, Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Bandung Barat Tahun 2015-2022

Tahun Year	Garis Kemiskinan (rupiah/kapita/bulan) Poverty Line (rupiah/capita/month)	Jumlah Penduduk Miskin (ribu) Number of Poor People (thousand)	Persentase Penduduk Miskin Percentage of Poor People
(1)	(2)	(3)	(4)
2015	275.327	205,69	12,67
2016	294.823	192,48	11,71
2017	309.304	190,90	11,49
2018	329.415	169,00	10,06
2019	341.307	159,03	9,38
2020	362.212	179,46	10,49
2021	374.470	190,77	11,30
2022	393.956	183,67	10,82

Sumber : BPS , Kabupaten Bandung Barat Dalam Angka 2023

Berdasarkan data BPS, jumlah kemiskinan pada tahun 2022 sebanyak 183,70 (dalam ribuan), menurun menjadi 179,40 (ribu) pada tahun 2023, artinya pemerintah Kabupaten Bandung Barat terus

berupaya untuk mengurangi angka kemiskinan di Kabupaten Bandung Barat, salah satunya dengan melaksanakan Program KUBE, program ini merupakan program kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Bandung Barat. Pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) di Kabupaten Bandung Barat dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Bandung Barat dengan melaksanakan pemberdayaan bagi masyarakat, yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dalam upaya peningkatan kemampuan KUBE, Pemerintah Kabupaten Bandung Barat mengalokasikan anggaran sebesar Rp. 180.000.000,- pada tahun anggaran 2023 untuk kelompok usaha bersama daerah yang terdiri dari 10 Kelompok Usaha Bersama (KUBE). Kelompok Usaha Bersama (KUBE) AMAR PATRIA UNIT 06 yang berlokasi di Kp. Curug Agung RW 06, Desa Kertajaya, Kecamatan Padalarang merupakan salah satu kelompok yang mendapatkan bantuan dari Pemerintah Kabupaten Bandung Barat sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah), bantuan tersebut diberikan kepada para pengembang usaha kelompok tersebut, dengan bantuan ini pemerintah Kabupaten Bandung Barat berharap agar KUBE dapat mengembangkan usahanya sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan anggota kelompok.

Pemerintah berharap program KUBE dapat menjadi media untuk meningkatkan motivasi warga miskin untuk maju secara ekonomi dan sosial, meningkatkan interaksi dan kerja sama dalam kelompok, memanfaatkan potensi dan sumber daya sosial ekonomi lokal, memperkuat budaya kewirausahaan, mengembangkan akses pasar, dan menjalin kemitraan sosial ekonomi dengan berbagai pihak terkait. Setiap keluarga miskin yang tergabung dalam kelompok dapat saling mengenal, berkomunikasi, dan berbagi pengalaman dalam mengatasi masalah serta memenuhi kebutuhan yang dirasakan. Dengan kata lain, tujuan KUBE tidak terbatas pada tujuan ekonomi, tetapi juga mencakup tujuan sosial dan kelembagaan.

Kebijakan pemerintah Kabupaten Bandung Barat dalam upaya menekan dan menurunkan angka kemiskinan, melalui program KUBE yang diselenggarakan oleh dinas sosial dengan memberikan bantuan berupa modal usaha, dapat menurunkan angka kemiskinan.

James E. Anderson dan Winarno (2014:18) menyatakan bahwa kebijakan adalah serangkaian tindakan yang memiliki tujuan yang ditentukan oleh seorang aktor atau sejumlah aktor dalam mengatasi suatu masalah atau isu. Sementara itu, menurut Krismartini (2016), kebijakan publik adalah tindakan pemerintah dalam merancang program untuk mencapai tujuan. Lebih lanjut, dijelaskan bahwa proses kebijakan publik meliputi lima tahap, yaitu (i) penetapan agenda; (ii) formulasi agenda; (iii) adopsi kebijakan; (iv) implementasi kebijakan; dan (v) evaluasi kebijakan.

Oleh karena itu, untuk mengukur tingkat keberhasilan implementasi kebijakan program bantuan bagi Kelompok Usaha Bersama (KUBE), perlu dilakukan evaluasi terhadap implementasi program tersebut.

Evaluasi program merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan secara sengaja oleh evaluator untuk mengamati dan mengukur keberhasilan program, serta dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi para pengambil keputusan dalam menentukan kebijakan bagi masyarakat. Idealnya, evaluasi kegiatan program KUBE dilakukan bersama oleh evaluator dan masyarakat melalui serangkaian kegiatan partisipatif atau pemantauan dan evaluasi partisipatif.

Berdasarkan uraian tersebut, dalam penelitian ini penulis memfokuskan pada permasalahan yang berkaitan dengan pelaksanaan Kelompok Usaha Bersama (KUBE), dalam upaya menurunkan angka kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mengidentifikasi permasalahan yang mungkin menjadi kendala dalam pelaksanaan program tersebut.

B. TINJAUAN PUSTAKA

Kebijakan publik memiliki makna yang lebih luas sebagai suatu tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah yang berdampak pada orang banyak. Sebagaimana dikatakan Mac Rae dan Wilde, kebijakan publik merupakan serangkaian tindakan yang dipilih oleh pemerintah yang memiliki pengaruh penting terhadap sejumlah besar orang. Pengertian ini mengandung makna bahwa kebijakan terdiri dari berbagai kegiatan yang saling terkait, yang merupakan pilihan pemerintah, sehingga kebijakan tersebut berdampak pada sejumlah besar orang, yang juga dapat diartikan sebagai suatu tindakan yang dilakukan oleh pemerintah, baik yang dilakukan maupun tidak dilakukan (Thomas R. Dye dalam Alamsyah (2016:28), yaitu suatu keputusan administratif pemerintah yang berdampak pada kehidupan bersama. (Nugroho, 2018).

Keputusan administratif pemerintah pada dasarnya merupakan suatu proses manajemen, yang terdiri dari beberapa tahapan, antara lain:

1. Dimulai dengan formulasi dan perencanaan
2. Implementasi melalui organisasi
3. Melaksanakan Pengawasan atau Pemantauan, Penilaian atau Evaluasi dan Pemberian Penghargaan;
4. Kinerja kebijakan merupakan suatu pencapaian dalam bentuk keluaran atau hasil, dan kinerja pada tingkat publik disebut sebagai hasil atau manfaat publik, dan
5. Ada kontrol

Kebijakan publik berdampak luas, melibatkan berbagai pihak, dan mengoptimalkan sumber daya yang tersedia. Kegiatan pemerintah diwujudkan sebagai hasil akhir berupa Kebijakan Publik (William N. Dunn, 2003). Lebih lanjut, William N. Dunn (2003) menyatakan bahwa kebijakan publik adalah pedoman yang memuat nilai-nilai dan norma-norma untuk mendukung tindakan pemerintah dalam yurisdiksinya. Proses kebijakan publik, menurut William N. Dunn (2003), adalah sebagai berikut:

1. Tujuan penyusunan agenda adalah agar suatu proses permasalahan dapat mendapat perhatian pemerintah;
2. Perumusan Kebijakan adalah proses merumuskan pilihan kebijakan oleh pemerintah;
3. Pembuatan kebijakan adalah proses ketika pemerintah membuat pilihan untuk mengambil tindakan atau tidak mengambil tindakan;
4. Implementasi kebijakan adalah proses penerapan kebijakan untuk mencapai hasil; dan
5. Evaluasi kebijakan adalah proses menilai hasil atau kinerja kebijakan yang telah dibuat.

Berdasarkan uraian atau pendapat yang disampaikan oleh ahli, dapat disimpulkan bahwa kebijakan dibuat oleh pemerintah untuk mencapai tujuan tertentu di mana terdapat aktor-aktor yang terlibat dalam mengatasi permasalahan yang muncul di lingkungannya, yang memiliki tujuan untuk mengatasi permasalahan tersebut. Hal ini sejalan dengan yang disampaikan oleh Anderson dalam *Islamy In Widodo*, kebijakan memiliki unsur-unsur yang terdapat dalam kebijakan publik, antara lain:

1. Kebijakan memiliki tujuan dan berorientasi pada sasaran yang ingin dicapai.
2. Kebijakan adalah tindakan yang diambil oleh pejabat pemerintah.
3. Kebijakan adalah apa yang harus dilakukan pemerintah untuk memecahkan masalah publik.
4. Kebijakan publik ada yang positif dan negatif yaitu tindakan pemerintah terhadap suatu masalah tertentu.
5. Kebijakan publik (positif) selalu didasarkan pada peraturan hukum tertentu dan bersifat memaksa (otoritatif).

Berdasarkan hal tersebut, apabila kebijakan publik merupakan serangkaian tindakan yang dipilih dan ditetapkan secara sah oleh pemerintah kepada seluruh masyarakat dengan tujuan tertentu dengan harapan kepentingan umum dapat tercapai, maka kebijakan publik harus mempunyai implikasi terhadap:

- a. Kebijakan publik yang dibuat dan dipilih oleh pemerintah merupakan tindakan pemerintah yang sah;
- b. Tindakan pemerintah yang difokuskan pada masyarakat bersifat mengikat;
- c. Tindakan pemerintah ini memiliki tujuan tertentu;
- d. Tindakan pemerintah tersebut selalu berorientasi pada pemenuhan kepentingan publik.

Secara sederhana, kebijakan publik adalah setiap keputusan yang dibuat oleh negara sebagai strategi untuk mewujudkan tujuan negara dalam mengarahkan masyarakat pada tahap awal, memasuki masa transisi, menuju masyarakat yang dikehendaki, yang pada umumnya menyangkut tindakan kolektif guna memecahkan berbagai permasalahan sosial yang ada.

Jika implementasi kebijakan merupakan suatu kegiatan atau tindakan dari suatu rencana terperinci untuk mencapai suatu tujuan, hal ini tentu saja dalam konteks tata kelola pemerintahan yang baik membutuhkan upaya untuk merancang formulasi kebijakan, proses implementasi kebijakan, dan evaluasi kebijakan. Ketiga rancangan ini saling melengkapi, yang merupakan fokus ilmu administrasi publik. Sebagai sebuah rancangan, implementasi kebijakan tidak muncul secara spontan, melainkan bersumber dari konsep kebijakan publik (*public policy*).

Implementasi adalah tindakan yang dilakukan oleh individu/pejabat atau kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan yang digariskan dalam keputusan kebijakan, Van Meter dan Van Horn (Winarno, 2002:102).

Mazmanian dan Sabatier menyatakan bahwa implementasi adalah pelaksanaan kebijakan dasar, baik berupa undang-undang maupun perintah atau keputusan penting, seperti putusan pengadilan. Proses implementasi ini terjadi setelah melalui beberapa tahapan, seperti pengesahan undang-undang, yang kemudian diikuti oleh keluaran kebijakan berupa pelaksanaan keputusan tersebut, dan seterusnya, hingga kebijakan tersebut direvisi.

Implementasi kebijakan berarti mencoba memahami apa yang sebenarnya terjadi setelah suatu program diimplementasikan atau dirumuskan, yaitu peristiwa dan kegiatan yang terjadi setelah proses pengesahan kebijakan negara, baik upaya untuk melaksanakannya maupun upaya untuk memberikan dampak tertentu terhadap peristiwa atau kebijakan tersebut. Sementara itu, Wibawa (2012: 5) menyatakan bahwa "implementasi kebijakan berarti pelaksanaan suatu kebijakan atau program."

Pandangan di atas menunjukkan bahwa proses implementasi kebijakan tidak hanya menyangkut perilaku badan administratif yang bertanggung jawab untuk melaksanakan program dan menciptakan kepatuhan pada kelompok sasaran, tetapi juga menyangkut lingkaran kekuatan politik, ekonomi, dan sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat memengaruhi perilaku semua pihak yang terlibat.

Berdasarkan pendapat para ahli tersebut, dapat diuraikan bahwa implementasi kebijakan adalah suatu proses pelaksanaan atau penerapan kebijakan melalui serangkaian tindakan operasional untuk menghasilkan hasil-hasil yang diinginkan.

Ada empat faktor atau indikator yang harus diperhatikan agar implementasi kebijakan efektif, yaitu;

1. Komunikasi Komunikasi merupakan salah satu variabel penting yang mempengaruhi implementasi kebijakan publik, komunikasi sangat penting dalam menentukan keberhasilan pencapaian tujuan implementasi kebijakan publik, implementasi yang efektif
 - a. Transmisi Komunikasi distribusi yang akan mampu menghasilkan implementasi yang baik, hal ini untuk menghindari kesalahpahaman dalam mengimplementasikan kebijakan.
 - b. Kejelasan Komunikasi, isi pesan kebijakan harus jelas sehingga mudah dilaksanakan oleh para pelaksana
 - c. Konsistensi; perintah yang diberikan harus konsisten
2. Sumber Daya mempunyai peranan yang sangat penting dalam pelaksanaan kebijakan agar kebijakan tersebut dapat berjalan secara efektif dan mencapai tujuan yang diinginkan.
3. Posisi Dalam kebijakan tidak boleh ada kesenjangan antara orang yang memberi perintah dan orang yang melaksanakan kebijakan.

Dalam implementasi suatu kebijakan, tentu saja tidak selalu berjalan sesuai harapan. Hal ini tentu dipengaruhi oleh faktor-faktor dalam implementasi kebijakan tersebut, Googon dkk. Erwan: 2012), seperti:

- a. Isi Kebijakan
- b. Format Kebijakan
- c. Reputasi Aktor

Untuk mengukur hal ini, evaluasi implementasi kebijakan diperlukan. Selama proses implementasi kebijakan, pemantauan dan pengawasan dilakukan untuk memastikan implementasi yang konsisten. Hasil dari implementasi kebijakan adalah kinerja kebijakan. Di sinilah evaluasi kebijakan diperlukan, yang bertujuan untuk memberikan informasi kepada para pembuat kebijakan tentang kinerja program mereka (Wibawa, 1994:13-14).

Evaluasi adalah proses untuk memberikan informasi tentang sejauh mana suatu kegiatan telah sesuai dengan target atau capaian yang diinginkan, bagaimana perbedaan antara capaian tersebut dan standar tertentu untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan di antara keduanya, dan bagaimana manfaat yang telah dicapai dibandingkan dengan harapan yang ingin dicapai. Evaluasi juga dapat diartikan sebagai proses identifikasi untuk mengukur/menilai apakah suatu kegiatan atau program yang dilaksanakan sesuai dengan perencanaan atau tujuan yang ingin dicapai.

Evaluasi dapat didefinisikan sebagai aktivitas menilai atau mengamati keberhasilan atau kegagalan suatu program/kebijakan yang dilaksanakan oleh individu/organisasi. Lebih spesifik lagi,

evaluasi berkaitan dengan produksi informasi informal mengenai nilai atau manfaat dari hasil kebijakan (Dunn, 2003).

Evaluasi adalah pendekatan untuk menilai suatu program, kebijakan, atau proyek selama periode waktu tertentu dan memastikan bahwa kebijakan tersebut memberikan hasil yang diinginkan secara sistematis dan objektif. Evaluasi memungkinkan kita untuk mendapatkan gambaran sekilas tentang realitas implementasi program dan memungkinkan generalisasi tentang pola hubungan antara berbagai dimensi realitas yang diamati.

Evaluasi dilakukan karena tidak semua program kebijakan publik mencapai hasil yang diinginkan (Winarno, 2014). Evaluasi kebijakan bertujuan untuk mengidentifikasi penyebab kegagalan kebijakan atau untuk menentukan apakah kebijakan publik yang diimplementasikan telah mencapai dampak yang diinginkan. Evaluasi kebijakan berfokus pada pemahaman bahwa suatu kebijakan publik tidak dapat diabaikan begitu saja. Kebijakan harus dipantau, dan salah satu mekanisme pengawasan tersebut adalah "evaluasi kebijakan". Evaluasi kebijakan direkomendasikan untuk dilakukan melalui perbandingan pilihan-pilihan berikut:

1. Perbandingan dengan tujuan;
2. Perbandingan dengan sejarah;
3. Perbandingan dengan praktik terbaik.

Berdasarkan teori evaluasi kebijakan yang disampaikan oleh para ahli di atas, dalam konteks penelitian ini, penulis menggunakan evaluasi kebijakan yang disampaikan oleh William N Duun (2003), untuk mengetahui dan mengukur tingkat keberhasilan implementasi program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) AMAR PATRIA UNIT 06 yang berlokasi di Kp. Curug Agung RW 06, Desa Kertajaya, Kecamatan Padalarang, berdasarkan beberapa kriteria yang harus dilakukan dalam proses evaluasi kebijakan:

- a. hasil (efek), atau mencapai tujuan tindakan.
- b. Efisiensi (efisiensi) mengenai jumlah upaya yang diperlukan untuk menghasilkan tingkat efektivitas tertentu.
- c. Kecukupan adalah sejauh mana kebijakan yang dibuat oleh pejabat pemerintah efektif dalam memenuhi kebutuhan nilai.
- d. Keadilan berkaitan erat dengan rasionalitas hukum dan sosial dan mengacu pada distribusi konsekuensi dan upaya antara kelompok-kelompok dalam masyarakat.
- e. Dan. Responsivitas adalah sejauh mana suatu kebijakan dapat memecahkan suatu masalah.
- f. Akurasi (kelayakan) Berkaitan erat dengan rasionalitas substantif yang mengacu pada nilai atau harga tujuan program dan kekuatan asumsi yang mendasari tujuan kebijakan tersebut.

Kerangka kerja ini berfungsi sebagai alur pemikiran bagi peneliti dalam melakukan penelitian deskriptif. Kerangka kerja ini berfungsi untuk memudahkan pembaca memahami tulisan yang disusun oleh penulis. Dalam penelitian ini, peneliti berfokus pada Evaluasi Kebijakan Program Kelompok Usaha Bersama (Kube) Amar Patria Unit 06 di Desa Kerta Jaya, Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, mulai dari perencanaan, proses, hingga pencapaian tujuan kebijakan.

Alasan penggunaan teori Evaluasi Kebijakan yang disampaikan oleh William Dunn adalah sebagai Indikator keberhasilan implementasi kebijakan program Kelompok Usaha Bersama (Kube) Amar Patria Unit 06 di Desa Kerta Jaya, Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, untuk mengetahui apakah implementasi program dapat berjalan sesuai harapan, atau adakah faktor-faktor lain yang dapat menghambat implementasi program tidak berjalan, dapat menjadi penghambat implementasi program. Menurut hemat penulis, evaluasi kebijakan yang disampaikan oleh William N Dunn dapat dijadikan alat analisis dalam menjawab permasalahan tersebut. Kerangka pemikiran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut

C. METODE

Metode penelitian yang digunakan peneliti adalah analisis deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah studi ilmiah yang bertujuan untuk memahami suatu fenomena dalam konteks sosial alaminya dengan mengintegrasikan proses interaksi komunikasi yang mendalam antara peneliti dan fenomena yang diteliti.

Metode penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk penelitian pada kondisi objek alamiah dimana peneliti merupakan

instrumen kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara sistematis. Purposive dan Snowball, Teknik pengumpulan dengan triangulasi. analisis dan sifat induktif atau kualitatif dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan pada makna daripada generalisasi. Strategi operasional variabel untuk memudahkan pembuatan pedoman observasi, dan pedoman wawancara, serta untuk menjelaskan permasalahan yang diteliti. Teknik pengumpulan data dengan cara melakukan observasi dan wawancara secara langsung terhadap sumber yang dijadikan objek dan lokus penelitian yaitu Dinas Sosial Kabupaten Bandung Barat dan Kelompok Usaha Bersama (Kube) Amar Patria Unit 06 di Desa Kerta Jaya, Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, serta dokumentasi. dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi kemudian disusun dalam bentuk narasi dan selanjutnya dilakukan analisis terhadap bahan-bahan yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi program kebijakan merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mengatasi permasalahan lingkungan, khususnya masyarakat Kabupaten Bandung Barat (KBB), dalam bentuk kebijakan pemerintah. Kebijakan dibuat oleh pemerintah untuk mencapai tujuan tertentu, dengan melibatkan para aktor yang terlibat dalam mengatasi permasalahan yang timbul dari lingkungannya.

Sederhananya, kebijakan publik adalah keputusan apa pun yang dibuat oleh negara sebagai strategi untuk mewujudkan tujuan negara dalam mengarahkan masyarakat pada tahap awal. Memasuki masyarakat yang sedang dalam masa transisi, menuju masyarakat yang diinginkan, merupakan tindakan kolektif untuk memecahkan masalah sosial yang ada di masyarakat. Cara kerja kebijakan publik sangat sederhana dan lugas; kebijakan publik merupakan pilihan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu.

Kebijakan yang dirumuskan pemerintah kemudian diimplementasikan ke dalam kegiatan konkret untuk mengatasi permasalahan yang teridentifikasi. Van Meter dan Van Horn mendefinisikan implementasi sebagai tindakan yang dilakukan oleh individu, pejabat, kelompok, lembaga pemerintah, atau sektor swasta yang bertujuan untuk mencapai tujuan yang digariskan dalam suatu keputusan tertentu. Lembaga-lembaga ini melaksanakan pekerjaan pemerintah yang berdampak pada warga negaranya.

Dye (1978) mengutip Wahab (2008), bahwa kebijakan publik adalah apapun yang dipilih pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan. Definisi ini mengacu pada tindakan pemerintah di berbagai sektor, seperti politik, ekonomi, dan sektor sosial, yang bersifat dinamis, di mana pemerintah merupakan satu-satunya otoritas dalam membuat kebijakan publik.

Implementasi merupakan salah satu tahapan dalam pembuatan kebijakan. Secara keseluruhan, tahapan-tahapan ini meliputi penetapan agenda, perumusan kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan, dan evaluasi kebijakan. Dari kelima tahapan pembuatan kebijakan yang disebutkan di atas, implementasi memainkan peran krusial. Wahab (1997:59) bahkan dengan tegas menyatakan bahwa "eksekusi kebijakan sama pentingnya, bahkan mungkin lebih penting, daripada pembuatan kebijakan. Kebijakan akan tetap menjadi impian atau cetak biru sampul arsip jika tidak diimplementasikan." Artinya, implementasi kebijakan merupakan sesuatu yang penting, bahkan mungkin lebih penting daripada sekadar impian atau rencana baik yang tersimpan rapi dalam arsip jika tidak diimplementasikan.

Implementasi kebijakan tidak hanya berkaitan dengan mekanisme penerjemahan keputusan politik ke dalam prosedur rutin melalui jalur birokrasi, tetapi lebih dari itu, implementasi kebijakan menyangkut isu-isu konflik, keputusan, dan siapa yang mendapatkan apa dari suatu kebijakan (Wahab (1997: 59). Oleh karena itu, tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa implementasi kebijakan merupakan aspek penting dari keseluruhan proses kebijakan.

Bahasa Indonesia: Salah satu program kebijakan yang dijalankan oleh pemerintah dalam hal ini pemerintah daerah Kabupaten Bandung Barat adalah program penanggulangan kemiskinan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) di Kabupaten Bandung Barat yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Bandung Barat, dimana sebagai perangkat daerah yang melaksanakan fungsi pemerintahan, Dinas Sosial Kabupaten Bandung Barat telah menyusun program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam program KUBE ini. Kegiatan pemberdayaan dan pengembangan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) pada Dinas Sosial Kabupaten Bandung Barat bertujuan untuk meningkatkan efektivitas Bantuan Sosial

kepada Kelompok Usaha Bersama (KUBE) untuk mencapai tujuan dan menciptakan kemampuan yang handal yang menghasilkan kemajuan dan kesejahteraan masyarakat.

Pemerintah berharap program KUBE dapat menjadi media untuk meningkatkan motivasi warga miskin untuk maju secara ekonomi dan sosial, meningkatkan interaksi dan kerja sama dalam kelompok, memanfaatkan potensi dan sumber daya sosial ekonomi lokal, memperkuat budaya kewirausahaan, mengembangkan akses pasar, dan menjalin kemitraan sosial ekonomi dengan berbagai pihak terkait. Setiap keluarga miskin yang tergabung dalam kelompok dapat saling mengenal, berkomunikasi, dan berbagi pengalaman dalam mengatasi masalah serta memenuhi kebutuhan yang dirasakan. Dengan kata lain, tujuan KUBE tidak terbatas pada tujuan ekonomi, tetapi juga mencakup tujuan sosial dan kelembagaan.

Serangkaian tindakan atau non-tindakan, kebijakan publik dapat berupa undang-undang, peraturan perundang-undangan, keputusan, atau perintah (Handoyo, 2012). Kebijakan yang diterapkan oleh Pemerintah Pusat tentu akan berdampak jangka panjang terhadap kebijakan daerah. Demikian pula, kebijakan di lingkungan Pemerintah Daerah harus sejalan dengan kebijakan Pemerintah Pusat. Kebijakan dalam program KUBE untuk penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Bandung Barat merupakan tindak lanjut dari kebijakan atau program yang telah direncanakan dan bahkan dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Implementasi KUBE di berbagai daerah tentu memiliki dampak yang signifikan terhadap tatanan kehidupan, termasuk penanggulangan kemiskinan di Bandung Raya, salah satunya Kabupaten Bandung Barat.

Dalam konteks penelitian ini terkait dengan judul penelitian yang penulis lakukan Evaluasi Kebijakan Program Kelompok Usaha Bersama (Kube) Amar Patria Unit 06 di Desa Kerta Jaya, Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat. Untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu kegiatan program yang dilaksanakan oleh Pemerintah khususnya Dinas Sosial Kabupaten Bandung Barat, dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan teori yang disampaikan oleh William N Dunn bahwa evaluasi kebijakan pada prinsipnya merupakan suatu proses yang dilakukan untuk menilai kinerja suatu kebijakan yang dihasilkan setelah kebijakan tersebut dibuat dan diimplementasikan (Dunn, 2003), berdasarkan hal tersebut maka hasil penelitian terhadap 6 (enam) indikator evaluasi kebijakan yang diajarkan, menghasilkan evaluasi sebagai berikut:

a. **Efektivitas**

Efektivitas, menyangkut apakah suatu alternatif mencapai hasil yang diharapkan (konsekuensi), atau mencapai tujuan tindakan.

Berdasarkan hasil penelitian pelaksanaan program KUBE, dilihat dari indikator efektivitasnya, dapat dikatakan efektif. Terlihat bahwa dari beberapa kelompok usaha yang memproduksi sangat produktif, terdapat pula kelompok usaha yang belum mencapai tingkat produksi yang baik. Hasil kebun, khususnya dari perkebunan, dapat dimanfaatkan oleh anggota dan sebagian dijual untuk membeli bahan baku perkebunan dan pertanian seperti pupuk dan pakan ternak, serta untuk operasional sehari-hari.

b. **Efisiensi**

Efisiensi adalah hubungan antara efektivitas dan upaya yang digunakan. Untuk mengetahui seberapa besar efisiensi program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dapat mencapai tujuannya, maka penulis melakukan wawancara kepada pihak departemen dan ketua kelompok. Hasil penelitian menyatakan bahwa terkait dengan anggaran, Anggaran yang diberikan belum dapat dikatakan mencukupi karena anggaran tersebut digunakan tidak hanya untuk operasional saja, tetapi juga digunakan untuk membeli bahan baku seperti pupuk, benih, alat pertanian, untuk mengatasi permasalahan tersebut, kami melakukan kegiatan pertanian yang hasilnya dapat dipanen dalam waktu singkat, seperti palawija, yang hasilnya dapat diprediksi kapan dapat dipanen, dari situ kami berusaha mengelola kebutuhan kelompok. Namun di sisi lain, hasil panen tersebut tidak semuanya digunakan untuk kebutuhan anggota, sebagian juga ada yang dijual, untuk menjual dalam jumlah banyak mereka masih kebingungan karena tidak ada pendamping yang memberikan arahan atau pelatihan dalam menjual hasil panen tersebut.

c. **Kecukupan**

Program Kelompok Usaha Bersama (Kube) yang diberikan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat belum dapat dikatakan menyelesaikan masalah, justru program KUBE telah menimbulkan permasalahan lain, seperti program tersebut belum mampu meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan bagi anggota kelompok, karena hasil usaha yang dilakukan

oleh kelompok KUBE Amar Patria Unit 06 di Desa Kerta Jaya, Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat belum mampu memberikan kesejahteraan bagi kelompok tersebut, masih terdapat kendala dalam memasarkan hasil panen, sehingga mereka menjual hasil panen tersebut masih secara tradisional dengan cara menawarkannya kepada masyarakat, tentu saja harga yang diperoleh tidak sesuai dengan harapan, selain itu uang yang diperoleh harus dapat memenuhi kebutuhan anggota dan membeli bahan baku untuk musim tanam berikutnya.

d. Kesetaraan (ekuitas)

Program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) ini untuk menyamakan manfaat yang diterima yang belum dirasakan dalam kelompoknya.

Kelompok KUBE Amar Patria Unit 06 di Desa Kerta Jaya, Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, bergerak di bidang pertanian dan perkebunan. Dari hasil panen yang hanya diperoleh sebulan sekali, jelas terlihat bahwa hal ini tidak akan mencukupi kebutuhan anggota maupun kelompok usaha. Sebagian besar anggota kelompok KUBE tidak memiliki usaha lain selain mengandalkan hasil panen dari kebun yang mereka garap.

e. Tanggung Jawab Responsivitas

pelaksanaan KUBE di Pemerintah Kabupaten Bandung Barat (KBB), khususnya Dinas Sosial, dinilai kurang. Fasilitator belum melakukan pemantauan dan evaluasi bulanan secara berkala. Meningkatkan pelaksanaan ini menjadi lebih dari sekali akan lebih efektif dan intensif. Mengingat banyak anggota KUBE berpendidikan rendah dan kurang berpengalaman, pemantauan yang sering sangat penting untuk meningkatkan pemahaman mereka terhadap kegiatan yang mereka lakukan.

Kurang aktifnya KUBE disebabkan oleh beberapa hal seperti kurang konsistennya anggota kelompok, kurangnya koordinasi dan komunikasi antar anggota, kurangnya sosialisasi dan pelatihan, serta minimnya pendampingan karena keterbatasan tenaga pendamping di Kabupaten Bandung Barat (KBB) dalam hal ini Dinas Sosial.

f. Ketepatan

Pemberian bantuan modal usaha kepada Kelompok Usaha Bersama (KUBE), berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti, menunjukkan bahwa Program KUBE yang diberikan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat belum dapat dikatakan tepat sasaran. Hal ini terlihat dari beberapa indikator yang menjadi tujuan pemberian bantuan modal usaha melalui KUBE.

- 1) belum mampu meningkatkan kesejahteraan anggota kelompok, hasil usaha yang diperoleh hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari saja, tetapi kami juga harus berbagi dengan beberapa anggota dan hasil usaha tersebut digunakan sebagai modal untuk membeli keperluan pertanian, dan hanya sebatas membeli bibit saja tidak untuk keperluan yang lain seperti pupuk, alat pertanian dan lain sebagainya.
- 2) Para anggota belum merasakan atau memperoleh nilai tambah apa pun dari hasil jerih payah mereka, terutama dalam meningkatkan keuangan keluarga. Karena pendapatan dari produksi KUBE masih kurang, tabungan untuk aset pribadi pun belum ada.
- 3) belum menjalin kerjasama dengan pihak lain terutama dalam memasarkan hasil usaha kelompok, masih melakukan penjualan secara tradisional dari pintu ke pintu, belum berbasis pemasaran daring maupun memanfaatkan kemajuan teknologi.

Enam indikator evaluasi yang dirumuskan dengan jelas menangkap kendala empiris yang terjadi, dan sayangnya, menjadi kelemahan mendasar yang berulang di Indonesia. Hal ini tentu menjadi catatan penting bagi pelaksanaan program pemberdayaan di masa mendatang agar lebih efisien dan efektif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Faktor penghambat dalam implementasi kebijakan program KUBE Pemerintah Kabupaten Bandung Barat pada kelompok Amar Patria Unit 06 di Desa Kerta Jaya, Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat dapat dikatakan belum optimal, diantaranya:

1. Kurangnya pendampingan dan evaluasi (monitoring) yang dilakukan Dinas Sosial Kabupaten Bandung Barat dalam meningkatkan perekonomian masyarakat
2. Kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Sosialisasi dan edukasi merupakan hal penting yang harus diberikan kepada anggota kelompok Amar Patria Unit 06 di Desa Kerta Jaya, Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat.

-
3. Bantuan pemasaran hasil pertanian belum terlaksana. Anggota kelompok Amar Patria Unit 06 di Desa Kerta Jaya, Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, masih kesulitan mengakses pemasaran hasil pertanian mereka.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan Evaluasi Kebijakan Program Kelompok Usaha Bersama (Kube) Amar Patria Unit 06 di Desa Kerta Jaya, Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Amar Patria Unit 06 di Desa Kerta Jaya, Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, belum dapat dikatakan berhasil karena pelaksanaannya belum memberikan dampak yang signifikan.
2. Baik untuk kelompok maupun individu. Birokrasi teknis, dalam hal ini Dinas Sosial, sebagai pelaksana program desentralisasi Kementerian Sosial, belum melakukan pendampingan dan evaluasi berkelanjutan. Namun, masyarakat masih menghadapi kendala teknis yang signifikan, sehingga pemantauan, evaluasi, dan solusi dari Dinas Sosial mutlak diperlukan. Di sisi lain, masyarakat juga perlu meningkatkan kapasitas pengetahuannya secara mandiri tanpa harus bergantung sepenuhnya pada pemerintah.
3. Faktor-faktor yang menghambat implementasi kebijakan program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Amar Patria Unit 06 di Desa Kerta Jaya, Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat adalah: Kurang optimalnya pendampingan bagi kelompok dan anggota KUBE, sosialisasi belum dilakukan secara serentak dan hanya dilakukan di awal tanpa ditindaklanjuti apakah sosialisasi dapat dipahami dan dimengerti oleh kelompok dan anggota KUBE, serta pendampingan pemasaran hasil produksi belum berjalan, dan sarana prasarana pendukung program masih dirasakan minim, sehingga banyak anggota kelompok yang kesulitan dalam melaksanakan program.

BIBLIOGRAFI

BIBLIOGRAFI

- Abdul Wahab, Solichin (2008). Analisis Kebijaksanaan dari formulasi ke implementasi kebijaksanaan negara. Jakarta : Bumi Aksara
- _____. 1997. Analisis Kebijaksanaan dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara. Jakarta, Bumi Aksara
- Agus, Erwan Purwanto dan Dyah Ratih Sulistyastuti. 2012. Implementasi Kebijakan Publik. Konsep dan Aplikasinya di Indonesia. Yogyakarta : Gava Media
- Akbar, Muh Firyal dan Widya Kurniati Mohi. 2018. Studi Evaluasi Kebijakan: Evaluasi Beberapa Kebijakan di Indonesia. Gorontalo: Ideas Publishing
- Anderson, L. W. et al. (2001). A Taxonomy for Learning, Teaching, and Assesing: A Revision of Bloom's Taxonomy of Educational Objectives. New York: Addison Wesley Longman Inc. Diterjemahkan oleh Prihantoro, A. (2010). Revisi Taksonomi Pendidikan Bloom. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Aufarul, M. Hardi,W. Retno S, A. (2019). Buku Ajar Teori Administrasi. Departemen Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
- Budi Winarno. (2014). Kebijakan Publik (Teori, Proses, dan Studi Kasus). Yogyakarta: CAPS (*Center Of Academic Publishing Service*).
- Dunn, William N., 2003, Pengantar Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta, Gajah Mada University
- Dye, T.R., 1978. Understanding Public Policy. Prentice Hall Inc Englewood Clift. New Jersey
- Handoyo, E. (2012). Kebijakan Publik (mustrose karya, Ed.). "Widiya Karya" Semarang & Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang.
- Hikmah, Herry.ed. 2005. Panduan Operasional Program Pemberdayaan Fakir Miskin di Wilayah KUBE Rintisan Pusat. Departemen Sosial RI.
- Indah Prabawati dkk, 2015, Analisis Kebijakan Publik Unesa University Press

- Jamhur Poti, Lia Agustina, Rudi Subiyakto (2023). Implementasi Program Kelompok Usaha Bersama Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Miskin Di Desa Lancang Kuning Kabupaten Bintan. *Jurnal Ilmu Hukum dan Politik*
- Jones, Charles O., *An Introduction to the Study of Public Policy*, diterjemahkan Ricky Istamto, Jakarta: CV. Rajawali, 1991
- Kamal A. (2016), *Buku Kebijakan Publik Konsep dan Aplikasi*. Bandung : Media Citra Mandiri Press
- Kusdarini, Malse Yulivestra, Vhuja Dekrismon (2023). Implementasi Program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Tanah Datar. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*.
- Lester, James P dan Joseph Steward Jr., 2000., *Kebijakan Publik: Pendekatan Evolusioner.*, Belmont: Wadsworth.
- Mas Halimah, M. Benni, Sukirman (2021) . Implementasi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Melalui Program Pemberdayaan Kelompok Usaha Bersama. *Jurnal Pemikiran dan Penelitian Bidang Administrasi, Sosial, Humaniora dan Kebijakan Publik*.
- Purwanti Basuki (2022). Implementasi Kebijakan Program Usaha Ekonomi Produktif Melalui KUBE di Desa Citarik Pelabuhan Ratu Sukabumi. *Jurnal Dialektika Politik*.
- Riant, Nugroho. 2018. *Public Policy, Dinamika Kebijakan Publik, Analisis Kebijakan Publik, Manajemen Politik, Etika Kebijakan Politik*. edited by Y. Masda. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Samodra Wibawa, 1994, *Kebijakan Publik :Proses dan Analisis, Cet.Ke-1*, Jakarta: Intermedia
- Tiny Sukmawati Burnama (2024). Evaluasi Implementasi Kebijakan Program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) di Wilayah Pesisir Kabupaten Kotawaringin Timur. *Anterior Jurnal*.
- Wibawa, Samodra, *Mengelola Negara*, Yogyakarta: Gava Media, 2012
- _____. 1994. *Kebijakan Publik Proses dan Analisis*. Jakarta: Intermedia.
- Winarno Budi, (2002), *Teori dan Proses Kebijakan Publik*, Media Pressindo, Yogyakarta
- _____, 2014. *Kebijakan Publik, Teori, Proses dan Studi Kasus*. Yogyakarta: CAPS.
- Wollman, Helmut dalam Frank Fischer, Gerald J. Miller, dan Mara S. Sidney (edtr)., 2007., *Handbook of Public Policy Analysis: Theory, Politics, and Methods.*, 2007., New York: CRC Press., Taylor & Francis Group.

Jurnal

- Boone, K., & Roets, G. (2018). Pekerjaan Sosial, Partisipasi, dan Kemiskinan. *Jurnal Pekerjaan Sosial*, 0(0), 1–18. <https://doi.org/10.1177/1468017318760789>
- Chriswardani Suryawati, 2005, Memahami Kemiskinan Secara Multidimensional, *Jurnal Manajemen Pelayanan Kesehatan*, Vol 8, No 03 <https://jurnal.ugm.ac.id/jmpk/article/view/2927>
- Debby D. V. Kawengian ,Joyce Jacinta Rares, (2015) Evaluasi Kebijakan Pencegahan Dan Pemberantasan Perdagangan Manusia (Trafficking) Terutama Perempuan Dan Anak Di Kabupaten Minahasa Selatan Provinsi Sulawesi Utara, e-Jurnal “ Acta Diurna Komunikasi ” Vol 4 no. 5 <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/actadiurnakomunikasi/article/view/9879>
- Dikson Silitonga, 2018, Evaluasi Outcome Kebijakan Publik (Studi Kasus: Evaluasi Outcome Kebijakan UN SD di Kota Madya Jakarta Pusat), *Jurnal Manajemen Bisnis*, Vol. 21 No. 3 <https://ibn.e-journal.id/index.php/ESENSI/article/view/138>
- Hadi, Krishno, Listiano Asworo, and Iradhad Taqwa Sihidi. (2020). “Inovasi Dialogis: Menuju Transformasi Pelayanan Publik Yang Partisipatif (Kajian Sistem Pelayanan Malang Online).” *Journal of Government and Civil Society* 4(1):115–29. <http://dx.doi.org/10.31000/jgcs.v4i1.2438>
- Irmawan. (2020). Keberhasilan Kube Mekarsari dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga. *Media Informasi Kesejahteraan Sosial*, 44(1), 130–142. <https://doi.org/10.31105/mipks.v44i1.1954>

Muhtar, I. N. (2016). Potensi Modal Sosial Pada Kelompok Usaha Bersama Program Penanggulangan Kemiskinan. *Sosio Informa*, 2(2), 155–165

Rifki Aditya, Wayan Tamba, Muhammad Arief Rizka, Evaluasi Implementasi Program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dalam Mengatasi Kemiskinan di Kota Mataram, *Jurnal kependidikan* Vol 4 No. 2 <https://moraref.kemenag.go.id/documents/article/99226966393103942>

Hukum

Undang-Undang Nomor. 11 tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial

Undang-Undang Nomor. 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin

Peraturan Menteri Sosial No.2 Tahun 2019 tentang Bantuan Sosial Usaha Ekonomi Produktif kepada Kelompok Usaha Bersama (KUBE)

Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan

Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 34 Tahun 2021 Tentang Tugas, Fungsi Dan Rincian Tugas Dinas Sosial